

**ANALISIS BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM
MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA KEPALA
PULAU KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

**Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara**



**Oleh
MAYA AFRILIA
NPM.220411042**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

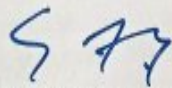
JUDUL : PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG ASPIRASI
MASYARAKAT DI DESA KEPALA PULAU
KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

NAMA : MAYA AFRILIA
NPM : 220411042
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



SAHRI MUHARRAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Proposal Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

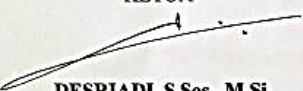
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 21
Bulan : Mei
Tahun : 2026

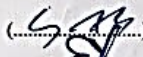
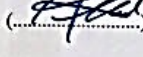
Tim Penguji

KETUA

SEKRETARIS


DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302


SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

- | | | |
|---------------------------------|----------------|---|
| 1. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si | (Pembimbing I) |  |
| 2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si | (Anggota) |  |
| 3. RISVANDI, S.Pd.I., M.Si | (Anggota) |  |

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan

SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : MAYA AFRILIA



MOTTO

"Allah memang tidak menjanjikan kemudahan hidup mu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa FA INNA MA'AL USRI YUSRO".
(QS Al-Insyirah 94:5-6)

"Minta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya ALLAH Bersama orang-orang yang sabar"
(QS.Al-baqarah, 153)

"Selesaikan Apa yang telah dimulai, Lewati saja badainya jangan ganti tujuannya'

"Orang tua dirumah menantikan kepulangan mu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluh mu, sebab letih mu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu".

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya".
(Maya Afrilia)

"Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun nggak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini".

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbi'aamin, Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT, Sang maha pemilik arah. Terimakasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terimakasih telah menjaga waras dan Langkahku, bahkan disaat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup. "Nyawaku Nyala Karna Dengan-mu".
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Saripul dan Ibu Tersayang Ibu Erni Haryanti yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata Lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi terimakasih untuk setiap cucuran keringat dan kerja keras otivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal yang engkau

tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai
ditahap ini.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA lah kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ahli keluarga yang mulia.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.Sos) pada Program Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Judul Skripsi penelitian adalah

“ ANALISIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT DIDESA KEPALA PULAU KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ”

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta tantangan yang penulis hadapi, namun akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama :

1. Ibuk DR. Ikrima Mailani, S.PDi., M.Pdi selaku Rektor universitas islam kuantan singing.
2. Bapak Sahri Muharram, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing, Sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing yang telah memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan.

5. Ayahanda tercinta Saripul, dan Ibunda tercinta Erni Haryanti yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Abang tersayang Nopri Lasandi, Kakak tersayang Siska Ardianti, Adik Tersayang Citra Lestari, Ponaan Tersayang Nur Khaila Septiana, Humaira Fauzia Zahra dan keluarga besar yang telah memberikan semangat kepada peneliti untuk selalu berusaha dengan baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman yang saya banggakan in the geng manphusoes yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
9. Dan untuk diri sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mendo'akan agar Allah SWT melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunianya yang berlipat ganda untuk segala kelancaran yang telah diberikan dan besar harapan penelitian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Teluk Kuantan, 13 April 2026


Maya Afrilia

Npm.220411042

DAFTAR ISI

	Halaman:
JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori Organisasi	13
2.1.3 Teori Pemerintahan Desa	17
2.1.4 Teori Kebijakan Publik	20
2.1.5 Teori Partisipasi Masyarakat	24
2.1.6 Teori Politik Lokal	27

2.1	Kerangka Pemikiran	31
2.2	Hipotesis	31
2.3	Defenisi Operasional	32
2.1.1	Mengawasi Kinerja Kepala Desa	32
2.1.2	Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	33
2.1.3	Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa	33
2.4	Operasional Variabel Penelitian	33

BAB III METODE PENELITIAN **36**

3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Informan	36
3.3	Sumber Data	38
3.4	Fokus Penelitian	38
3.5	Lokasi Penelitian	38
3.1	Metode Pengumpulan Data	38
3.2	Metode Analisis Data	39
3.8	Jadwal kegiatan Penelitian	40

BAB IV **41**

4.1	Sejarah Singkat Desa Kepala Pulau	41
4.2	Demografi	42
4.3	Keadaan Sosial	44
4.4	Keadaan Ekonomi	45
4.5	Kondisi Pemerintahan Desa	45
4.6	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	46
4.7	Kondisi Sosial Budaya Desa Kepala Pulau	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **49**

5.1	Identitas Responden	49
5.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
5.3	Faktor-faktor yang Menjadi Kendala	63

5.4 Hasil dan Analisa 64

BAB VI PENUTUP 67

6.1 Kesimpulan 67

6.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

68

DOKUMENTASI

70

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman :
Tabel 2.1 Konsep, Indikator, dan Item Penilaian	34
Tabel 3.1 Informan Penelitian Peranan BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Didesa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	37
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	40
Tabel 4.1 Pembagian Luas Wilayah Desa Kepala Pulau	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.3 Sarana Lembaga Pendidikan DiDesa Kepala Pulau	44
Tabel 4.4 Jumlah Aparat Desa Kepala Pulau	45
Tabel 5.1 Identitas Informan	49
Tabel 5.2 Informan Menurut Jenis Kelamin	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman :
Gambar 2.1 Konsep, Indikator, dan Item Penelitian	31



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Kepala Pulau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
- Lampiran 2 : Surat Pra Riset
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/Riset Di Desa Kepala Pulau
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara Penelitian
- Lampiran 6 : Catatan Bimbingan Proposal
- Lampiran 7 : Catatan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal
- Lampiran 9 : Surat Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

**Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Didesa Kepala
Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Maya Afrilia

Npm.220411042

**Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi**

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Analisis Badan Permusyawaratan Desa didesa kepala pulau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu sampel bertujuan sesuai dengan tujuan penelitian nantinya. Analisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah diolah kemudian dikembangkan lagi serta diinterpretasikan dengan kata-kata secara merinci dan mendalam agar lebih mudah dipahami nantinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis peranan badan permusyawaratan desa (BPD) didesa kepala pulau kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan telah menjalankan perannya dengan cukup baik. Dalam pengawasan BPD melakukan pemantauan terhadap kinerja kepala desa, merancang dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa, dan menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman tugas pokok dan fungsi dan rendahnya partisipasi Masyarakat, kurangnya komunikasi antar Masyarakat, serta belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Analisis, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

**Analysis Of The Village Consultative Body (BPD) in Accommodating
Community Aspirations in Kepala Pulau Village, Kuantan Hilir District,
Kuantan Singingi Regency**

Maya Afrilia

NPM: 220411042

**Study Program of Public Administration, Faculty of Social Sciences
Islamic University of Kuantan Singingi**

ABSTRACT

This study explains how the Analysis of the Village Consultative Body in the village of Kepala Pulau. The data collection technique in this study uses observation, interview and documentation methods. While the research informants in this study amounted to 16 people consisting of the Village Head, Village Secretary, BPD Members, Community Leaders, and the Community. Research informants were determined using purposive sampling, namely the sample aims to be in accordance with the objectives of the research later. Data analysis in the study is by using qualitative descriptive analysis, namely data that has been processed is then developed again and interpreted in words in detail and in depth to be easier to understand later. The results of the study show that the Analysis of the role of the Village Consultative Body (BPD) in the village of Kepala Pulau, Kuantan Hilir District, Kuantan Regency has carried out its role quite well. In supervision, the BPD monitors the performance of the village head, designs and agrees on draft village regulations with the village head, and channels and accommodates the aspirations of the village community. However, its implementation still faces obstacles, such as limited understanding of the main tasks and functions and low community participation, lack of communication between communities, and not fully in accordance with the needs of the community.

Keywords: Analysis, Village Consultative Body (BPD)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem Demokrasi Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana seluruh proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah Pembangunan dan kebijakan pemerintahan.

Sebagai upaya memperkuat demokrasi dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, pemerintah menerapkan sistem desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengelola pemerintahan secara mandiri.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berhenti pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga menyentuh hingga ke tingkat paling bawah, yaitu desa. Desa memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan nasional karena desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di desa. Pemerintah kemudian mengatur secara khusus mengenai desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di desa kepala pulau, kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singing, keberadaan BPD seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan usulan terkait Pembangunan dan pelayanan desa, namun dalam praktik efektifitas BPD dalam menjalankan fungsi penampungan aspirasi tersebut masih belum optimal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat dua unsur utama yang berperan penting, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala

desa beserta perangkatnya yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, sedangkan BPD berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. BPD merupakan wujud nyata implementasi demokrasi di tingkat desa karena menjadi wadah aspirasi masyarakat serta berperan sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Berikut tugas badan permusyawaratan desa (BPD) adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi kinerja kepala desa
2. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Keberadaan BPD diharapkan mampu menciptakan mekanisme dalam pemerintahan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dengan fungsi tersebut, BPD menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam

mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dimana BPD dalam menampung aspirasi masyarakat nya dengan mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang mana disebut dengan MusDes, Dimana pertemuan ini dilakukan sekali setahun. Dimana pertemuan ini di adakan agar masyarakat dapat menyuarakan masukan-masukan dan keluhan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut Arisnawawi dkk. (2025) dalam Buku Geliat Masyarakat Pedesaan Pesisir Membangun Ekonomi Biru menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan adalah komunitas kecil yang bergantung pada lokalitas dan hasil alam, serta memiliki hubungan sosial yang erat dan pola hidup sederhana. Berikut ciri-ciri masyarakat pedesaan yaitu :

1. Mata pencaharian dominan di sektor agraris seperti pertanian, peternakan, atau perikanan kehidupan ekonomi banyak bergantung pada alam dan sumber daya lokal.
2. Hubungan sosial bersifat kekeluargaan interaksi antarwarga lebih erat, intens, dan personal dibanding masyarakat perkotaan.
3. Gotong royong dan kebersamaan tinggi kerjasama dan solidaritas sosial menjadi nilai penting dalam kehidupan sehari-hari.

4. Nilai budaya dan adat istiadat masih kuat tradisi lokal masih sangat memengaruhi perilaku, norma, dan praktik sosial masyarakat desa.
5. Tingkat pendidikan dan kesehatan umumnya lebih rendah dibanding masyarakat di kota karena fasilitas yang terbatas.
6. Lingkungan alam masih alami desa masih didominasi oleh pemandangan alam seperti sawah, kebun, dan sungai yang menjadi bagian penting kehidupan warga.

Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Pembangunan desa pada hakikatnya harus dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima hasil pembangunan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Partisipasi masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan desa, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Namun, dalam praktiknya, peran BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawas kinerja pemerintah desa belum sepenuhnya berjalan optimal di berbagai desa, termasuk di Desa Kepala Pulau

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana pengawasan yang dilakukan Meskipun secara normatif BPD memiliki peran yang sangat strategis, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan BPD belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyak aspirasi masyarakat yang hanya sebatas menjadi wacana atau pembicaraan informal tanpa adanya tindak lanjut yang jelas dan nyata. Seperti Dalam konteks perbaikan jalan, BPD melakukan pengawasan, kapan dilakukan nya pengawasan dan tindak lanjut dari pengawasan tersebut.

- 1) Bentuk pengawasan yang dilakukan :
 1. Inspeksi lapangan , Anggota BPD meninjau langsung lokasi perbaikan jalan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan rencana yang telah ditetapkan.
 2. Memeriksa Kualitas Pekerjaan, Mengecek bahan yang digunakan (aspal, batu, semen, dll.), metode pengerjaan, dan keamanan jalan.
 3. Membandingkan dengan Rencana Anggaran (APBDes) Mengecek apakah dana yang digunakan sesuai jumlah dan alokasi yang tercantum di APBDes.
 4. Melibatkan Masyarakat Mengumpulkan masukan warga yang menggunakan jalan tersebut, misalnya keluhan tentang kualitas atau keterlambatan pekerjaan.

- 1) Kapan Pengawasan Dilakukan, yaitu
 1. Sebelum Pengerjaan, memastikan rencana, anggaran, dan kontraktor jelas.
 2. Selama Pengerjaan, BPD memantau progres, kualitas, dan kesesuaian dengan rencana.
 3. Setelah Pengerjaan, mengecek hasil akhir pekerjaan, apakah sudah layak digunakan dan sesuai anggaran.
 4. Berdasarkan Laporan Masyarakat, jika ada keluhan tentang pekerjaan atau kualitas jalan.
- 1) Tindak Lanjut Pengawasan, yaitu :
 1. Memberikan Rekomendasi Perbaikan Jika ditemukan kualitas yang kurang baik, pekerjaan harus diperbaiki sesuai standar.
 2. Meminta Penjelasan atau Laporan Kepala Desa Kepala desa diminta mempertanggungjawabkan pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pekerjaan.
 3. Menyampaikan Masalah ke Musyawarah Desa Jika masalah serius, dibahas bersama warga dan BPD untuk mengambil keputusan.

Desa Kepala Pulau merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Berdasarkan data desa, wilayah

Desa Kepala Pulau didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan dengan luas mencapai 150 hektar, serta ladang dan tegalan seluas 35 hektar. Jumlah penduduk Desa Kepala Pulau mencapai 1.617 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Dengan potensi tersebut, seharusnya pembangunan desa dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan desa yang baik dan partisipatif.

Selain itu, masyarakat Desa Kepala Pulau memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat, dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan berasal dari berbagai suku, seperti Melayu dan Minangkabau. Keberagaman ini seharusnya menjadi modal sosial yang besar dalam membangun desa melalui musyawarah dan partisipasi kolektif. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam hal penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya analisis BPD di Desa Kepala Pulau. Pertama, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi yang dimilikinya, sehingga pelaksanaan peran BPD tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, komunikasi antara BPD dan masyarakat belum berjalan

efektif, sehingga aspirasi masyarakat tidak terhimpun secara sistematis. Ketiga, rendahnya tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

Permasalahan tersebut berdampak langsung pada lambatnya pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan desa sering kali tidak terealisasi, sehingga pembangunan yang dilakukan kurang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BPD sebagai lembaga demokrasi desa belum berfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai Analisis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat, khususnya di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana BPD telah menjalankan tugas dan fungsinya, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat peran BPD sebagai pilar demokrasi desa serta mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah Analisis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kepala Pulau?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kepala Pulau

1.1 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Studi Ilmu Administrasi Negara dimasa mendatang.

1.4.2 **Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat demi lebih meningkatkan peran Lembaga tersebut dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara terminology apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan pengaturan dalam terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi adalah Kerjasama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan Bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Amin Ibrahim, Administrasi negara adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

Menurut Edward H. Litchfield, Administrasi Negara adalah sebagai suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Menurut Felix A. Nigro, Administrasi Negara adalah bentuk usaha kerjasama kelompok dalam lingkungan publik, yang kemudian mencakup dalam tiga, yakni lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif yang dilakukan kerjasama dalam upaya menciptakan kesejahteraan bersama.

Menurut Harbani Pasolong administrasi negara sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua yakni, administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan pemerolehannya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain atau lebih tepatnya disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja, Sebagaimana ditentukan dengan struktur dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas

secara terstruktur, kegiatan dan proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia.

Atmosudirdjo (dalam Ngusmanto, 2105 : 15) administrasi adalah sesuatu yang terdapat didalam suatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang, tumbuh dan bergerak.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan Keputusan-keputusan yang telah diambil dan ditentukan sebelumnya (Siagian, 2014 : 4).

Menurut Simmon (dalam Syafi, 2010 : 13) Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36) :

a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari

(unavoidable). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga ataupun orang lain.

b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap

warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, dilaut, dan diudara

e. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagainya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah diukur.

g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat mengehendaki administrasi negara terbuat banyak untuk memenehi

kebutuhan mereka. Dipihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21). Administrasi Negara adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan untuk mengurus negara dengan menggunakan instrument pengaturan sehingga proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengurus negara dan masyarakat senantiasa berjalan dengan teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif (Makmur, dkk 2017 : 30).

Menurut Nigro (dalam Listyaningsih, 2014 : 3) Administrasi negara adalah suatu kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif, mempunyai suatu peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi negara merupakan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan, yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan dari suatu negara

untuk kepentingan umum. Administrasi negara merupakan suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

2.1.2 Teori Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah dimana usaha kerja sama itu diselenggarakan. James D. Mooney (dalam The Liang Gie, 1979 : 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasikan (Organizing) ialah penyusunan struktur dengan membagi-bagi dan menghubungkan-hubungkan orang, wewenang, dan tanggung jawab menjadi kesatuan yang selaras. Termasuk pula dalam proses mengorganisasi atau membentuk organisasi ini ialah penentuan tujuan yang hendak dicapai.

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai

berikut :

“Organisasi merupakan tata hubungan sosial, Dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. (Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah Batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan Bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson, Ivancevuch & Donelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan, (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.

Menurut Max Weber Organisasi adalah batasan-batasan yang mengatur interaksi antarindividu, bukan berdasarkan kemauan pribadi melainkan aturan-aturan tertentu. Ia juga mendefinisikannya sebagai kerangka hubungan terstruktur yang memiliki wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja.

Menurut Ernest Dale Organisasi adalah proses perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan struktur pola hubungan kerja antar orang dalam suatu badan usaha.

Menurut Koontz dan O'Donnel, organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang terstruktur, baik secara vertikal, maupun secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Louis A. Allen Organisasi adalah sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan, (2017 : 5) Organisasi adalah sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hasibuan, organisasi jika dilihat dari sudut tujuannya dikenal organisasi Perusahaan dan organisasi sosial. Organisasi Perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya ekonomis rasional. Sedangkan organisasi sosial bertujuan memberikan pelayanan, sedangkan prinsip kegiatannya ialah pengabdian sosial, misalnya organisasi republik Indonesia.

Sedangkan hubungan dalam organisasi adalah pimpinan yang cakap harus memelihara semua hubungan ini secara harmonis, supaya potensi organisasi dimanfaatkan optimal. Tugas menjaga hubungan ini sangat sulit, karena latar belakang karyawan yang heterogeny, yang dibawa kedalam organisasi tersebut.

Menurut Stoner, (dalam Mulyadi, 2015 : 6) organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui nama orang-orang dibawah pengarahan pimpinan mengejar tujuan bersama.

Sedangkan menurut Adam Wijaya, (dalam Mulyadi, 2015 : 11) perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan Tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap manusia.

Menurut Herbert G. Hicks membedakan macam-macam organisasi atas dasar tingkat kepastian struktur, atas dasar keterlibatan emosi

anggota, dan atas dasar tujuan.

Menurut Oliver Sheldon (1923) Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia.

Kesimpulan tersebut ialah organisasi bukan sekedar Kumpulan orang dan pula bukan hanya sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu asas organisasi. Salah satu asas tidaklah dapat menjadi pengertian umum, atau dengan perkataan lain arti Sebagian tidak dapat menjadi keseluruhan, untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamika pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas Menyusun kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kegiatan usaha Kerjasama dengan jalan membagi dan menelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan Menyusun jalinan hubungan kerja diantara ketiga macam pandangan atau para pejabatnya.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah

yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan Lembaga musyawarah desa.

Pemerintahan desa berlandaskan keterbukaan, akuntabilitas profesionalitas, efektivitas, serta kewenangan dari hak asal usul, skala local, dan tugas pemerintah, Pembangunan desa dilakukan partisipatif dengan gotong royong, memanfaatkan kearifan local, dan sesuai rencana kerja pemerintah desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Struktur dan Fungsi (Merujuk Permendagri No. 84 Tahun 2015) Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut UU Desa dan mengatur secara rinci struktur Pemerintahan Desa yang terdiri dari:

1. Kepala Desa: Pimpinan tertinggi Pemerintah Desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Perangkat Desa: Terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Sering disebut sebagai

"parlemen" desa, berfungsi sebagai lembaga perwujudan demokrasi, membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa (seperti yang diteliti oleh Cristin Walukow dan Karlos Mangoto pada tahun 2015).

Kewenangan Desa Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat des

Pemerintahan Desa Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ini adalah proses dan fungsi).

Marwoto Soewito Tata pemerintahan desa mengandung makna sebagai kaidah dan tata aturan yang menjadi kerangka kerja maupun tata aturan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan desa.

H.A.W. Widjaja (Landasan Pemikiran) Pemerintahan Desa harus didasarkan pada landasan pemikiran: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Definisi ini berfokus pada tujuan dan prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan di

Desa).

Perspektif Administrasi Pembangunan Pemerintahan Desa dipandang sebagai unit pemerintahan terendah yang bertugas menjalankan program-program pembangunan dari atas (Pusat/Daerah) sekaligus melaksanakan pembangunan yang berbasis pada prakarsa dan kebutuhan masyarakat (Desa Membangun).

Secara umum, Pemerintahan Desa adalah kegiatan memimpin dan mengurus desa yang mencakup aspek administratif, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkatnya) dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kesimpulannya adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dengan hak asal usul yang mendiami wilayah tertentu dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi) sambil tetap melaksanakan fungsi pemerintahan negara. Dan Pemerintahan Desa adalah mekanisme/proses yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkatnya untuk menjalankan otonomi desa dan kewenangan yang diberikan oleh negara, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.4 Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye (1981 : 1) Kebijakan publik adalah apapun

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh ketika pemerintah mengetahui ada jalan raya yang rusak dan tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.definisi kebijakan dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misal nya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkan kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan politik untuk

memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.

Menurut Charles O. Jones, kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau Keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, Keputusan, standar, proposal, dan grand design. namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang. Namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah dipaparkan diatas, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu Lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu kita memerlukan Batasan atau konsep kebijakan publik yang tepat.

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli

mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda, namun suatu definisi yang dianggap lebih tepat dalam buku ini adalah suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah Tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu para ilmuwan dalam mengkaji kebijakan publik dapat menempatkan ilmu politik sebagai ilmu yang “bebas nilai” atau sebaliknya, ia dapat lebih aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dan dengan demikian tidak bebas nilai.

Kebijakan menurut Anderson (Ali Imbron, 2002 : 13) bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Syafaruddin (dalam Duryat, 2022 : 3) kebijakan adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manager dan personal dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Budiarto (Duryat, 2022 : 3) bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012 : 21) Implementasikan yaitu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implomentor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul hasil kebijakan (policy output) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Menurut Udoji mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Van Meter dan Van Horn

mendefenisikan implementasikan sebagaitindak-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijkan sebelumnya (dalam Winarno, 2010 : 149) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses danpencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diinginkan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diartikan Grindle bahwa pengukuran keberhasilan implementasi

dapat dilihat dari prosenya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai (dalam Agustino, 2008 : 139). Menurut Charles J. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program (dalam Suryana, 2009 : 28) yaitu :

1.

Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dapat berbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

3. Penerapan atau aplikasi

Perlu adanya

pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Terdapat banyak model implementasikan menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan van Horn (1975).

2.1.5 Teori Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat Theresia et all (2015;196)

partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong menekan untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya. Pengertian partisipasi masyarakat menurut, Theresia et all (2015;196) mengatakan pengertian dasar partisipasi adalah Tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses Pembangunan Dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan dan program, perencanaan dan Pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan Keputusan.

Heresia et al. (2015): Partisipasi berarti masyarakat adalah subjek, bukan objek pembangunan, yang terlibat dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil, membutuhkan kepercayaan dari pemerintah untuk menciptakan peluang.

Teori partisipasi terkini fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama, menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung (kesempatan, kepercayaan), dan membedah berbagai level keterlibatan untuk memastikan partisipasi yang bermakna, bukan hanya formalitas, menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai

keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia et all 2015 : 196)

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Partisipasi berarti ikut serta dalam mengikuti dan menyertai suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Pengertian Masyarakat Menurut Purwaningsih (2020 : 41) menyatakan bahwa Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara \

berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis dan dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.

Menurut Handayani (2017) menyatakan bahwa “Masyarakat merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang menghasilkan kebudayaan dan diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan suatu aturan.

Menurut Theresia et all (2015:207) menyatakan bahwa Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :

1. Kesempatan untuk Berpartisipasi Pada kenyataannya, banyak program pembangunan yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di sisi lain, juga sering dirasakan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka akan berpartisipasi.
2. Kemauan untuk berpartisipasi, Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi ditentukan oleh sikap masyarakat untuk menciptakan atau meningkatkan kehidupannya yang

menyangkut

3. Kemampuan untuk Berpartisipasi, Adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Theresia et all (2015:203) mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi masyarakat, yaitu :

- a. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu untuk mewujudkan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan diatasi.
- b. Partisipasi penuh artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
- c. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dimunculkan pemerintah, tetapi rakyat tidak diberi kesempatan untuk memikirkan kepentingan pribadinya dan tidak diberi kesempatan untuk membentuk tuntutan atau mempengaruhi jalannya kebijakan negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

partisipasi masyarakat adalah partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses Pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang pentingnya ketelibatan masyarakat dalam hal tersebut. Kesadaran serta keterlibatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah sikap masyarakat dalam hal ini, yakni memenuhi kewajibannya dalam memayar pajak bumi dan bangunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang telah ditentukan.

2.1.6 Politik Lokal

Politik lokal merupakan bagian fundamental dari sistem politik modern yang mencerminkan interaksi antara pemerintahan, aktor politik, budaya masyarakat, dan dinamika kekuasaan di tingkat daerah. Teori politik lokal mencoba menjelaskan bagaimana dinamika kekuasaan itu terbentuk dan beroperasi di tingkat lokal, apa yang membedakannya dari politik nasional, serta apa implikasinya terhadap demokrasi, pemerintahan, dan legitimasi politik.

Secara umum, politik lokal dapat didefinisikan sebagai proses interaksi sosial yang berorientasi pada pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, serta perebutan dan penggunaan kekuasaan pada tingkat wilayah atau daerah. Politik ini memiliki karakteristik khusus, antara lain lebih dekat dengan kepentingan masyarakat akar rumput, diprakarsai oleh elite setempat, dan sering dipengaruhi oleh struktur sosial budaya lokal

(misalnya kekerabatan, adat, dan agama).

Dalam kajian literatur politik lokal di Indonesia, penelitian lintas studi menunjukkan bahwa politik lokal tidak hanya berfokus pada indikator formal demokrasi seperti pilih langsung dan partai politik, tetapi juga bekerja melalui jaringan informal, patronase, dan relasi personal yang memengaruhi kualitas pemerintahan lokal serta representasi politik masyarakat.

Salah satu komponen utama dalam teori politik lokal adalah elite lokal aktor yang memiliki sumber daya, jaringan sosial, dan kemampuan untuk menggerakkan dukungan politik di wilayah tertentu. Elite ini dapat terdiri dari kepala daerah, elite partai, pengusaha lokal, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang memiliki akses ke sumber daya politik dan ekonomi. Dalam prakteknya, elite lokal cenderung menggunakan posisi dan relasi mereka untuk mempertahankan kekuasaan serta memperluas pengaruhnya. Hal ini terjadi karena struktur kelembagaan di tingkat lokal sering memberikan ruang bagi elite untuk bertindak di luar norma formal demokrasi, seperti melalui patronase atau kolusi antar elite.

Dalam banyak studi empiris, praktik politik lokal sering dilandasi oleh patronase politik dan klientelisme yakni bentuk relasi timbal balik di mana elite memberikan sumber daya atau keuntungan tertentu kepada kelompok masyarakat sebagai imbalan atas dukungan politik. Relasi ini

menciptakan loyalitas yang bersifat personal dan pragmatis, yang sering kali melemahkan prinsip representasi berbasis program atau ideologi. Udi kasus pemilu legislatif di suatu daerah menunjukkan bagaimana patronase masih mendominasi proses politik lokal bahkan pada kontestasi elektoral modern, dengan implikasi bagi kualitas demokrasi lokal. Selain itu, penelitian lain pada pemilihan kepala desa juga menemukan bahwa politik patron-klien sering menjadi mekanisme utama dalam mobilisasi dukungan dan legitimasi sosial, terutama di wilayah pedesaan. Praktik klientelisme juga berkontribusi pada pembentukan kekuasaan keluarga atau dinasti politik di tingkat lokal, di mana kekuasaan cenderung diwariskan atau dikekalkan dalam jaringan elite tertentu. Eori politik lokal menekankan pentingnya budaya politik spesifik daerah dalam membentuk dinamika kekuasaan dan partisipasi warga. Budaya lokal—yang meliputi nilai-nilai adat, agama, serta norma sosial—bukan hanya memengaruhi perilaku pemilih, tetapi juga legitimasi politik para pemimpin.

Misalnya, di beberapa daerah, simbol-simbol budaya atau legitimasi adat memainkan peranan penting dalam kontestasi politik lokal, karena ia memengaruhi persepsi masyarakat tentang siapa yang layak memimpin dan atas dasar apa dukungan diberikan. Hal ini menandakan bahwa politik lokal tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial

budaya masyarakat setempat, yang sering kali menciptakan realitas politik yang berbeda secara signifikan antar daerah.

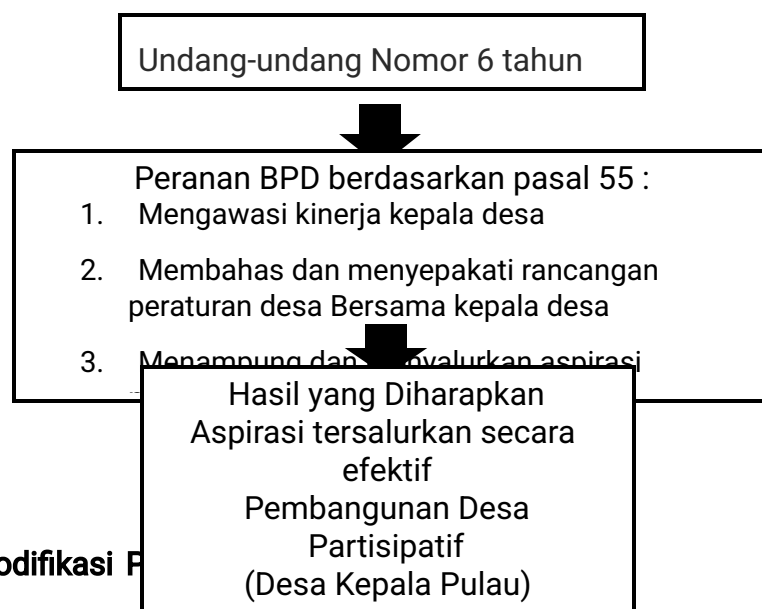
Teori politik lokal memberi kerangka penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan kontestasi politik di tingkat daerah. Politik lokal bukan sekedar versi kecil dari politik nasional, tetapi realitasnya dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya lokal, relasi patronase, dan praktik elite yang khas tiap wilayah. Desentralisasi membuka peluang demokratisasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan substantif terhadap akuntabilitas dan kualitas demokrasi.

Pemahaman terhadap politik lokal sangat penting bagi pengembangan kebijakan publik, penguatan pemerintahan daerah yang partisipatif, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses politik agar lebih representatif dan akuntabel.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang diuraikan dalam telaah pustaka, maka dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian Analisis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung Aspirasi Masyarakat Di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber Modifikasi F

2.1 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Analisis BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Itu Masih Kurang Berperan.

2.4 Definisi Operasional

Operasional adalah penetapan atau pemberian makna suatu variabel dengan cara merinci kegiatan atau Tindakan yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel tersebut secara konkret dan dapat diamati. Definisi ini berfungsi agar variabel dapat diukur secara konsisten dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis. Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Analisis Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4.1 Mengawasi Kinerja Kepala Desa

Mengawasi kinerja kepala desa adalah kegiatan memantau dan menilai pelaksanaan tugas kepala desa agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat. Pengawasan meliputi pengelolaan Dana Desa dan APBDes, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat,

serta kepatuhan terhadap hukum dan etika pemerintahan. Pengawasan dilakukan oleh BPD, masyarakat, dan pemerintah di atasnya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

2.4.2 Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa

Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa adalah bekerja sama dengan kepala desa dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

2.4.3 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dilakukan dengan cara menerima usulan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat, lalu menyampaikannya kepada pemerintah desa agar dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa.

2.5 Operasional Variabel

Konsep operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional dari suatu penelitian. Dalam hal ini, mengenai Analisis BPD yang terdapat di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi harus di spesifikasikan terlebih dahulu. Untuk lebih

jelasnya perhatikan table berikut.

**Tabel 2.1 Konsep, Indikator Dan Item Penilaian Tentang Analisis
Peranan BPD di Desa Kepala Pulau**

Konsep	Indikator	Sub Indikator	Item Penilaian
Analisis Peranan BPD Di desa kepala pulau	1. Mengawasi Kinerja Kepala Desa	1. Memastikan kepala desa mematuhi peraturan perundang-undangan 2. Mengawasi perilaku dan etika kepemimpinan kepala desa 3. Pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa	Ordinal
	1. Membahas dan menyepakati	1. Mengadakan musyawarah desa atau	Ordinal

	rancangan peraturan desa Bersama kepala desa	konsultasi dengan warga untuk memperoleh masukan. 2. Memperbaiki rancangan sesuai hasil pembahasan dan masukan masyarakat.	
	1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	1. Menerima usulan, keluhan, dan saran dari warga desa melalui musyawarah, forum, atau saluran resmi. 2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.	Ordinal

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu memberikan Gambaran tentang masalah yang akan diteliti, menyangkut bagaimana peranan BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat.

Menurut Nofirda (2025:108) penggunaan metode penelitian yang menekankan pemahaman tentang konteks, makna dan fenomena yang berfokus pada kata-kata, atau obeservasi mendalam.

Pendekatan ini biasanya melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang peran BPD dalam konteks alami.

Prosedur umum yang digunakan :

1. Wawancara terkait dengan berbagai informan terkait seperti Ketua BPD, perangkat desa, dan Masyarakat untuk memahami pandangan dan pengalaman mereka.
2. Observasi langsung terhadap aktivitas BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat.

3.2 Informan

Menurut Basrowi dan Suwandi, Infroman adalah orang dalam pada latar belakang penelitian, fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan saat penulis mulai memasuki

lapangan dan selama penelitian berlangsung. dimana informasi yang peneliti dapatkan nanti tentunya dari kepala desa, perangkat desa, BPD dan anggota dan tokoh masyarakat yang ada di desa kepala pulau.

Informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian Peranan BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Didesa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris desa	1
3	BPD dan Anggota	4
4	Tokoh Masyarakat	5
5	Masyarakat	5
Jumlah		16

Sumber : Data Olahan Penelitian, 202 6

Dari tabel 3.1 di atas bisa dilihat bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang. Para informan memiliki kemampuannya masing-masing dalam menjalankan tugas. Dari kesemua informan inilah penulis akan mendapatkan informasi secara mendalam.

Adapun teknik yang dipakai penelitian dalam penelitian ini adalah

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:96) purposive sampling adalah teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data didapat berupa dari individu, kelompok, tempat, dokumen, atau fenomena. Secara umum sumber data dibagi menjadi dua jenis utama :

1. Sumber data primer : Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian, misalnya wawancara, observasi, survei.
2. Sumber data sekunder : Data yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, seperti dokumen, arsip, laporan, atau data yang sudah ada dan digunakan sebagai penunjang penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian disini adalah untuk melihat bagaimana Peran BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, menurut Bungin observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh penulis saat berada dilapangan. Observasi ini berbagai hal yang penulis perhatikan, seperti kondisi keluarga informan, ekonomi, sosial.
2. Wawancara, merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan, dengan maksud untuk mendapatkan Gambaran lengkap tentang topik yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara mendalam, terperinci dan Gambaran yang jelas mengenai peran BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

Kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman, (dalam sugiyono, 2013 : 91) teknik Analisa data dapat dilakukan dengan tahap Langkah data rreduction, data display, dan verification. Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah di olah kemudian dikembangkan lagi serta diinterpretasikan dengan kata-kata secara merinci dan mendalam agar lebih mudah dipahami nantinya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh berbentuk kalimat-kalimat dan aktivitas-aktivitas. Analisis data ini dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensi yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Sedangkan metode induktif dalam penelitian kualitatif menjadi sesuatu yang penting.

Kaitannya dengan penelitian ini adanya kebiasaan data dari pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara dan isi suatu dokumennya yang berkaitan dengan Langkah tersebut penyusunan data yang dilakukan diupayakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

--

JADWAL PENELITIAN																												
Proposal	PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGU KE-																											
	Nov. 25				Des. 25				Jan. 26				Feb. 26				Mar. 26				Apr. 26				r e l 26			
Minggu ke	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan dan Pembuatan Proposal																												
Bimbingan Proposal																												
Pencarian Data Awal																												
Seminar Proposal																												
Revisi Proposal																												
Bimbingan Skripsi																												
Sidang skripsi																												
Revisi Skripsi																												

Sumber : Modifikasi Peneliti 2026



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Kepala Pulau

Pada masa dahulu Desa Kepala Pulau mulanya hanya berupa satu desa yang disebut dengan panggilan Banjae Kepala Pulau dan berbatasan langsung dengan Banjae Nan Duo yakni Banjae Kampung Tengah dan Banjae Pulau Madinah. Seiring dengan berkembangnya penduduk pecahan dari Banjar Nan Tigo Sebagian penduduk berpindah ke daerah dataran tinggi atau jalan raya Sebagian ke Kampung Medan dan Dusun II dan Dusun III desa Kepala Pulau selanjutnya disebut dengan pepatah adat Tali Tigo Sapilin dan Saibek Nasi Sakucung Gulei dengan artian Kok Kamudik Saontak Gala Kok Kaulak Sarongkuoh Dayung. Kok kabukik Samo Mandaki Kok Kalurah Samo Manurun. Saciok Bak Ayam Sa doncing Bak Bosi. Samo Saruruik Bak Sipucung, Samo Saalun Bak Galombang, begitulah aturan orang tua-tua dahulunya, dibawah bimbingan Bapak Banjae yang di gelar panggilan Banjae Nan Tigo Desa Nan Ompek, salah satunya Desa Kepala Pulau.

Mayoritas mata pencaharian desa kepala pulau yaitu pertanian, Perkebunan, dan peternakan, desa kepala pulau memiliki berbagai suku, seperti suku Melayu, Caniago, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Dan Nan Onom.

Pada tahun 1970-an masyarakat desa kepala pulau semakin berkembang dan berangsur meninggalkan desa kepala pulau yang disebut Desa Induk. Berkembang ke daerah Kebun karet atau dataran tinggi yang tidak terpengaruh oleh banjir Sungai batang kuantan. Dalam hal ini terbentuk dua bagian daerah, yakni Polong Duo dan Batang Tabalai sampai ke dusun batammuncak, dengan pemekaran kecamatan

pangean, maka Sungai Batang Tabalai menjadi pembatas desa kepala pulau dengan kecamatan pangean sekitar tahun 1987-1998.

Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi memiliki visi dan misi Periode 2020-2027, sebagai berikut :

1. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa, sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa melaksanakan dan mewujudkan Pembangunan fisik dan Pembangunan mental yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa mewujudkan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa kepala pulau.

Terwujudnya Visi dan Misi Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :

1. Pemerintahan berwibawa, manajemen birokrasi pemerintahan desa yang profesional dan transparan.
2. Pembangunan fisik dan mental, adanya perbaikan infrastruktur desa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religious dan berbudaya.
3. Kemandirian Ekonomi, teroptimalkannya potensi desa, yang

berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

4.2 Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak Geografi Desa Kepala Pulau, terletak diantara :

1. Sebelah utara desa gunung medan
2. Sebelah Selatan batang kuantan
3. Sebelah barat desa pasar baru, kecamatan pangean
4. Sebelah timur desa kampung medan

a) Luas Wilayah Desa

Tabel 4.1 Pembagian Luas Wilayah Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Wilayah	Luas Wilayah (Ha)
1	Pemukiman	35 ha
2	Pertanian/Perkebunan	150 ha
3	Ladang/Tegalan	125 ha
4	Hutan	0 ha
5	Rawa-Rawa	0 ha
6	Perkantoran	0.25 ha
7	Sekolah	6 ha
8	Jalan	45 ha
9	Lapangan	2 ha

Sumber : Monografi Desa Kepala Pulau, 2026

b) Orbitasi Desa (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)

1. Jarak ke ibukota terdekat : 4 km
3. Jarak ke ibukota kabupaten : 36 km
4. Jarak lama tempuh ke ibukota : 36 menit
kabupaten

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	826
2	Perempuan	791
Jumlah		1617

Sumber : Monografi Desa Kepala Pulau, Tahun 201

1.1 Keadaan Sosial

Sarana dan prasarana Inspratuktur Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

- a) Lembaga Pendidikan

Tabel 4.3 Sarana Lembaga pendidikan di Desa Kepala Pulau

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Bangunan (Gedung)	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD/MI	1
4	SLTP/MTS	1
5	SLTA/MA	1

Jumlah	5
---------------	----------

Sumber : Monografi Desa Kepala Pulau, Tahun 2015

Dari data 4.3 diatas, dapat dilihat, bahwa di desa Kepala Pulau sudah adanya bangunan untuk paud, sd, slta/mts, slta/ma.

b) **Transportasi Desa (Wisata)**

Wisata Budaya & Rumah Adat, di kecamatan kuantan hilir terdapat rumah adat koto tuo yang menjadi salah satu destinasi wisata budaya sejarah.

1.1 Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian di desa kepala pulau kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi ditopang oleh pertanian, yaitu didominasi jenis karet, palawija, peternakan dan perikanan.

1.2 Kondisi Pemerintahan Desa

a) **Lembaga Pemerintahan**

Jumlah Aparat Desa :

Tabel 4.4 Jumlah Aparat Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi		
No	Jabatan	Jumlahh (Jiwa)
1	Kepala desa	1 orang
2	Sekretaris desa	1 orang

3	Perangkat desa	5 orang
4	Ketua BPD dan Anggota	7 orang
Jumlah		14 orang

Sumber : Monografi Desa Kepala Pulau, Tahun 2026

a) Pembagian Wilayah

Nama Dusun

1 Dusun I : 1 RW dan 2 RT

2 Dusun II : 2 RW dan 4 RT

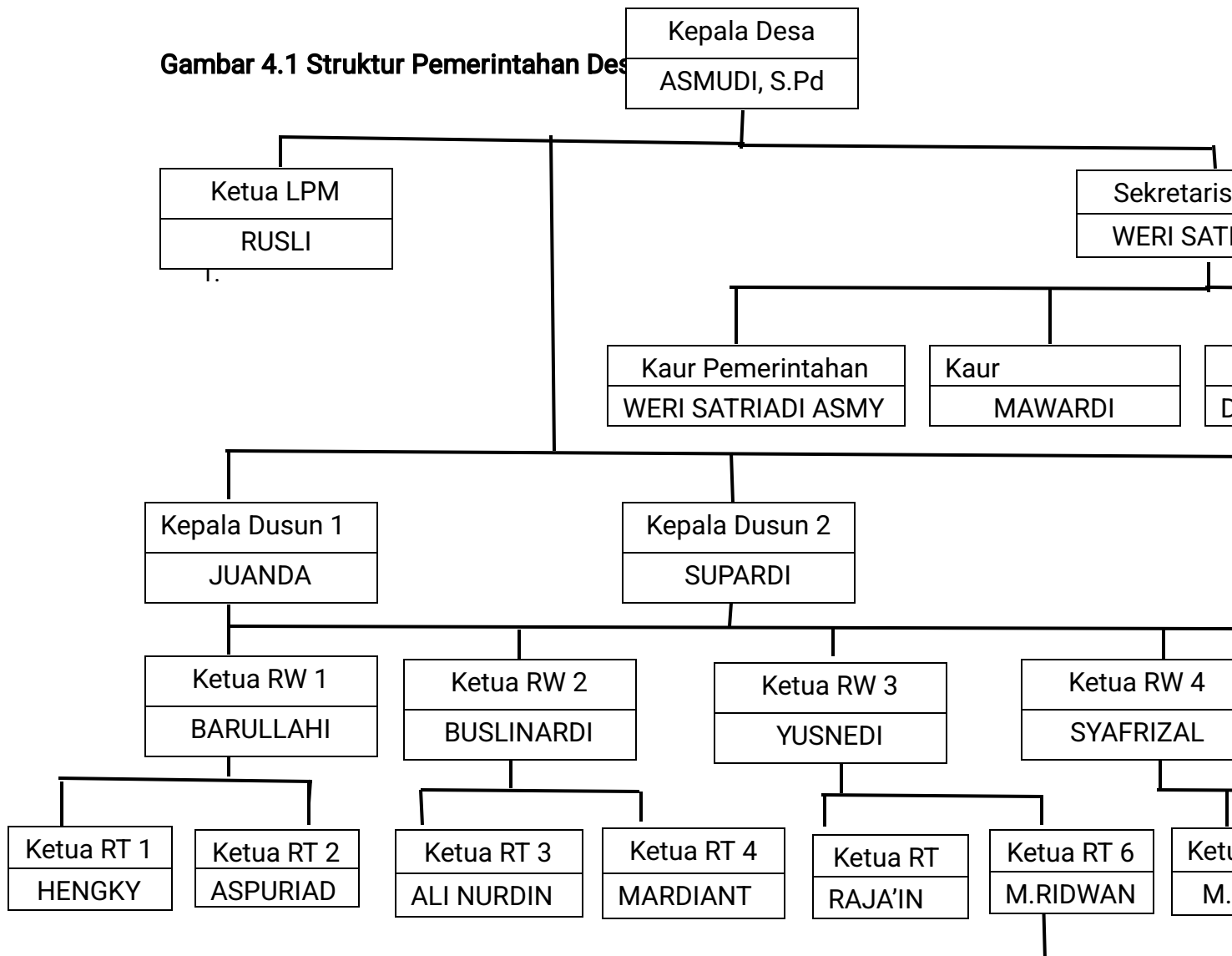
3 Dusun : 2 RW dan 4 RT

III

1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SPOD)

Struktur organisasi desa kepala pulau kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singing menganuut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa



Dalam melaksanakan tugas, pelaksanaan pemerintahan di desa kepala pulau kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi, para perangkat desa dan anggota BPD memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yaitu :

2. kepala desa yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu kepala desa juga memiliki hak, wewenang, dan kewajiban, dan kepala desa juga memiliki larangan yang harus dipatuhi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Perangkat desa (sekretaris, kaur, dll), memiliki tugas dan fungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa dan mereka juga memiliki larangan yang harus dipatuhi, sesuai dengan

undang-undang yang berlaku.

4. BPD mempunyai tugas mengawasi kinerja kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

1.1 Kondisi Sosial Budaya Desa Kepala Pulau

Berikut adalah kondisi sosial budaya desa kepaka pulau :

1. Aspek Sosial dan Mata Pencaharian, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani padi sawah dan berkebun karet. Kehidupan masyarakat diwarnai dengan budaya gotong royong dalam aktivitas pertanian, meskipun bergeser ke sistem upah akibat mekanisme.
2. Aspek Budaya dan Tradisi, desa ini kental dengan budaya melayu kuantan. Tradisi yang ada umumnya berkaitan dengan siklus pertanian, seperti tradisi menanam

padi. Perubahan sosial terlihat dari pergeseran tradisi menanam

padi secara tradisional
menuju penggunaan
teknologi (traktor/benih
unggul) yang lebih cepat
dan efisien.

3.

Adat Istiadat, pengaruh
adat melayu kuantan
singing yang
berlandaskan "Adat
Bersandi Syarak, Syarak
Bersandi Kitabullah"
masih kuat dianut oleh
masyarakat setempat.

4.

Infrastruktur dan
lingkungan, terletak di
kecamatan kuantan hilir,
wilayah ini berada di aliran
Sungai kuantan yang
subur, mendukung
aktivitas pertanian sawah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kepala Pulau telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. BPD juga berfungsi sebagai mengawasi kinerja kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan juga sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti kurang nya pemahaman tugas, rendahnya partisipasi Masyarakat, kurang nya komunikasi antar Masyarakat, serta belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran BPD agar pembangunan desa lebih efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga aspirasi yang disampaikan ditindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan

6.2 Saran

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Diharapkan BPD dapat lebih meningkatkan perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara lebih aktif melakukan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan, saran, maupun usulan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sama dengan BPD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam setiap kegiatan musyawarah desa agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi, baik melalui musyawarah desa maupun melalui BPD sebagai perwakilan masyarakat, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang peranan BPD ataupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta

dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, 2025, kebijakan publik Penerbit Widina
- Adi, Isbandi Rukminto. (2015). Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andssri Wahyudi. (2024). Kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Publiciana.
- Arisnawawi dkk. (2025) dalam Buku Geliat Masyarakat Pedesaan Pesisir Membangun Ekonomi Biru
- Budi Winarno, (2017). Pemerintahan Desa dan Pembangunan Berbasis Komunitas. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Fadillah Putra. (2023). "Village Governance and Public Participation in Indonesia" studi empiris tentang partisipasi publik dalam pemerintahan desa, aspirasi masyarakat, dan masalah tokenisme (tingkat partisipasi rendah).
- Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan.
- Hayat, Hayat, S.AP., M.Si., 2017, Manajemen Pelayanan Publik, Penerbit Yrama Widya.
- Hidayat, A. (2023). Analisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.
- <https://www.kepalapulau.com/>
- Irfan Setiawan, 2018, Handbook Pemerintahan Daerah, Wahana Resolusi

Mulyadi, Deddy, 2015. Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan.
Bandung : Alfabeta

Nigro, Felix A. Dasar-dasar Administrasi publik modern, Palmall 2016

Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Permana, P. A. Kontradiksi Struktural dalam Politik Lokal Indonesia Pasca Orde Baru. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan (2022).

Rizal Yaya & Sukardi. (2025). Pengaruh implementasi egovernment dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dengan good government governance sebagai variabel pemoderasi.

Safitri, E., Akhyar, T., & Apriani, R. Patronase Politik dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta CV

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 55 menetapkan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Widjaja, HAW. 2018. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yuliananingsih, dkk. 2024. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Unsur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa j Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama : Maya Afrilia
 NPM : 220411042
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

A. Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
 (memastikan kepala desa mematuhi peraturan perundang-undangan)

1. Bagaimanakah langkah yang dapat Bapak/Ibu/Saudari/i lakukan untuk memastikan bahwa kepala desa telah mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku?

Berikan Ulasan

.....

(Mengawasi perilaku dan etika kepemimpinan kepala desa)

2. Apa saja cara yang dapat Bapak/Ibu/Saudari/i terapkan untuk mengawasi perilaku serta etika kerja kepala desa yang ada didesa

kepala pulau tersebut?

Berikan Ulasan

.....

.....

(Pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa)

3. Menurut Bapak/Ibu/Saudari/i Apa mekanisme pengawasan yang telah diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa kepala pulau kecamatan kuantan hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

.....

- A. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa didesa kepala pulau kecamatan kuantan hilir kabupaten Kuantan Singingi.

(mengadakan musyawarah desa, konsultasi dengan warga untuk memperoleh masukan)

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudari/i apakah rancangan peraturan desa, proses pengadaan musyawarah desa dan pengumpulan masukan dari masyarakat sudah berjalan dengan baik? Jika sudah apa dampak positifnya

Berikan Ulasan

.....

.....

(memperbaiki rancangan sesuai hasil pembahasan)

2. Menurut Bapak/Ibu/Saudari/i apakah rancangan sudah sesuai dari hasil pembahasan dan masukan masyarakat setelah di perbaiki ?

Berikan Ulasan

.....

.....

- A. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didesa kepala pulau kecamatan kuantan hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

(menerima usulan, keluhan dan saran dari warga desa)

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudari/i bagaimana kesiapan yang diterapkan oleh BPD beserta anggotanya dalam menerima keluhan dan usulan dari masyarakat desa kepala pulau tersebut?

Berikan Ulasan

.....

.....

(menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan)

2. Menurut Bapak/Ibu/Saudari/i apakah rancangan yang sudah diperbaiki sudah sesuai dengan hasil pembahasan dan masukan masyarakat desa kepala pulau?

Berikan Ulasan

.....
.....

DOKUMENTASI



GAMBAR 1. WAWANCARA BERSAMA KEPALA DESA

GAMBAR 2. WAWANCARA BERSAMA SEKRETARIS DESA



GAMBAR 3. WAWANCARA BERSAMA KETUA BPD



GAMBAR 4. WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655, e-mail: uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 148/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Nama : SAHRI MUHAMMAD, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I
 - b. Nama : SARJAM M, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

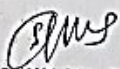
Nama : Maya Afrilia
 NPM : 220411042

Judul Skripsi : Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat keketiruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 19 NOVEMBER 2025
 Dekan,


 SAHRI M. S.Sos., M.Si
 NIDN. 1008128002

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Uniksquantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MAYA AFRILIA
NPM : 220411042
DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. SAHRI MUHARRAM S.Sos., M.Si
 2. SARJAN M, S.Sos., M.Si
JUDUL : PERANAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD)
 DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT
 DIDESA KEPALA PULAU KECAMATAN KUANTAN
 HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	28/11-2025	Perbaiki Cover petajin latar belakang			
	26/11-2025	jumlah anggota BPD disebut kan, dan Revisi			
	26/11-2025	Revisi latar belakang 2-3 kali			
	25/11-2025	Perbaikan BPD dan cara kerja			
		Perbaikan penuh			

Perbaikan BPD
I

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maya Afrilia
 NPM : 220411042
 Judul : Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Didesa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
 Pembimbing 1 : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
 Pembimbing 2 : Sarjan M, S.Sos., M.Si

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	2/2-2026	Revisi Pertyun Wawancara		/	
		Legitikan ke P1		/	
	24/2-2026	Acc Rapor Wawancara	/		
	30/3-2026	Revisi Skripsi Soran		/	
		Kulikan wawancara		/	
	1/4-2026	Revisi Revisi Revisi		/	



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

Form 12

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Maya Afrilia

NPM : 220411042

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 22 Januari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Maya Afrilia
 NPM : 220411042
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Kamis/ 21 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Risvandi, S.Pd., I., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing I (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maya Afrilia
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun/26 April 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir
 Alamat Email : mafrilia36@gmail.com
 Pendidikan : 1. Tahun 2012 LULUS SD Negeri 009 Kampung Medan
 2. Tahun 1992 LULUS SMP Negeri 2 kuantan hilir
 3. Tahun 1998 LULUS SMA Negeri 1 Kuantan Hilir

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 30 Agustus 2026

Penulis

MAYA AFRILIA
NPM.220411042